

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*, Jakarta:Rajawali Press,2002.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1998).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Juana, *Hukum Pemerintah Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: PT. Alumni Bandung,2004).
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Alumni Bandung, 1976.
- Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Manan Bagir, *Perjalanan Historis Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945*, (Karawang:Uniska Karawang,1993).
- Masyhuri, *Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia: Kebijakan Pengembangan Daerah dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Kajian Potensi dan Kendala Pengembangan Ekonomi Daerah(P2E-LIPI), 2010).
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia,2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Prenada Medis Group, 2010.
- Purwaka Hendra Tommy, *Metodologi Penelitian Hukum*,Jakarta: Universitas Atma Jaya,2007.
- Ronny Hanintijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.
- Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soekanto Soerjono,*Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta: UI Press,1984.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Syamsudin M,*Operasionalisasi Penelitian Hukum*,Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007.
- Widjaja H.A.W., *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau.

Jurnal

Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume (1), Nomor (4), 2013: (1411-1420), *Sistem Pelayanan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Jaringan Transportasi Darat Di Kota Samarind*, 2013.

Jurnal Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015, *Pengawasan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai*